

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR DI DESA TONGKE-TONGKE KECAMATAN SINJAI TIMUR

Oleh:
Jusniaty¹ & Susanalindra²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Pemberdayaan perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur sudah terlaksana dengan baik. Upaya dalam mengembangkannya adalah dengan melakukan pembinaan, mengikuti perempuan dalam organisasi, memberikan dana untuk berusaha dan memberikan pelatihan untuk membuka daya dan bakatnya. Sedangkan dalam hal melindungi perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki di Desa Tongke-Tongke dalam hal ekonomi, belum sempurna karena masih minimnya wawasan dan sumber daya manusia yang dimiliki perempuan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar lebih memberdayakan perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke, yaitu: 1) Membuka lapangan kerja baru, berupa usaha-usaha yang melibatkan perempuan pesisir serta meningkatkan pelatihan-pelatihan berupa cara pengolahan ikan, pembuatan abon, pembuatan bakso ikan dan atau pembuatan ikan kaleng. 2) Menambah besarnya modal untuk kelompok usaha perempuan pesisir. 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang usaha perempuan pesisir agar lebih maju dan sukses.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan Pesisir

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan karakteristik keluarga yang khas. Dominasi penduduk atau penghuni setiap harinya adalah wanita dan anak-anak. Sebagian lelaki yang terdiri dari suami maupun remaja, banyak mempergunakan waktunya untuk melaut. Pada umumnya kaum perempuan ditinggal melaut antara 1-2 minggu, sedangkan sisanya adalah nelayan biasa (melaut malam hari) dan sebagian lagi berlayar sampai sebulan atau lebih (ikut kapal besar), sehingga dapat dikatakan sebagian besar tanggungjawab kelangsungan hidup sehari-hari pada keluarga tersebut ada di tangan wanita sebagai ibu sekaligus ayah. Hal-hal seperti ini menjadikan upaya-upaya pemberdayaan atau intervensi yang dilakukan untuk mensejahterakan keluarga

nelayan perlu dititikberatkan pada kemampuan wanita yang ada di Desa Tongke-Tongke.

Perempuan merupakan tiang Negara telah sangat familiar di telinga kita bahkan sejak usia dini, tidak jarang tunas bangsa banyak yang sudah fasih mengucapkannya. Sayangnya, pengenalan konsepsi itu belum diimbangi dengan kebijakan dan spirit memadai untuk memposisikan kaum hawa itu pada tempat yang terhormat sesuai dengan fitrahnya (Susanto, 2011: 29). Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perempuan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembangunan. Perempuan memiliki kemampuan untuk menyusun rencana dan menjalankan tugas dengan kualitas yang tidak kalah dari kaum pria. Dalam berbagai bidang perempuan telah berpartisipasi misalnya di bidang kesehatan, bidang pemerinta-

han dan sebagainya. Perempuan yang mendapat bimbingan dan arahan yang tepat, khususnya perempuan yang terdapat di pesisir pantai akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Misalnya memberikan pelatihan dalam pengolahan berbagai hasil tangkapan dari laut. Dengan berperannya perempuan, selain menjadi tiang dalam rumah tangga, sebagai insan pendidik anak-anaknya, perempuan juga dapat menopang perekonomian keluarga. Dari seorang perempuan yang memiliki kualitas pengetahuan yang baik, akan terlahir generasi daerah yang berkualitas pula. Ini berarti perempuan memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan khususnya di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur.

Namun dalam aplikasinya kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bantuan kredit sampai dalam pengenalan teknologi, masih sangat jauh dibandingkan dengan kesempatan yang diperoleh kaum pria. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbatas, perempuan diperkotaan mulai menyadari ketertinggalannya. Kesadaran ini mendorong kaum perempuan untuk memperjuangkan haknya dalam mengaktualisasikan dirinya agar lebih berperan dan mendapat akses yang seimbang di segala bidang pembangunan. Sebaliknya perkembangan tersebut relatif lambat untuk perempuan yang tinggal di pedesaan terutama di daerah pesisir, karena keterbatasan fasilitas umum yang tersedia, seperti informasi dan sentuhan teknologi, sehingga aktualisasinya dalam pembangunan masih jauh dari harapan. Tentunya dibutuhkan perhatian dan tindakan yang nyata dari pihak yang bersangkutan untuk menghadapi masalah ini. Sehingga segala potensi perempuan daerah pesisir dapat dikembangkan demi

kemajuan bangsa umumnya dan kemajuan daerah pesisir pada khususnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka alasan penulis mengambil judul ini dan berlokasi di Kecamatan Sinjai Timur adalah khususnya di Desa Tongke-Tongke yang jumlah penduduknya saat ini 3.848 jiwa, jumlah penduduk perempuan 2.003 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki 1.845 jiwa (BPD. Kab. Sinjai, 2012: 9). Sebagai salah satu dari anggota keluarga, seorang perempuan yang telah menikah dituntut ikut berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga tidak hanya tergantung dari apa yang dilakukan dan diperoleh suami. Hal ini pun berlaku juga pada keluarga yang berada di Desa Tongke-Tongke yang mana penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada alam, jadi dalam mencari penghasilan nelayan dipaksa bisa membaca setiap kondisi dan situasi alam. Musim ikan tidak berlangsung setiap tahun, namun hanya beberapa bulan saja. Hal inilah yang membuat para nelayan harus selalu berpikir keras mendapatkan hasil yang lebih untuk digunakan di waktu tidak melaut.

Dalam hal ini peran perempuan merupakan salah satu komponen yang penting dalam pembangunan pesisir, hal ini disebabkan karena posisi perempuan sangat strategis dalam kegiatan perikanan sebagai contoh, perempuan sangat berperan sebagai pedagang, pengecer, pengumpul ikan, pedagang besar, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Jadi kehidupan keseharian, perempuan memiliki peran yang lebih besar ketimbang kaum pria, di mana di satu sisi mereka di tempatkan pada posisi domestik, pada sisi yang lain memegang peranan sosial-ekonomi juga.

Keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi keluarga di Desa Tongke-Tongke, memberikan pandangan tersendiri bahwa antara kaum pria maupun kaum perempuan tidak ada pembakuan peran bahwa perempuan hanya mampu berperan dalam rumah tangga saja sedangkan kaum laki-laki bertugas diluar rumah, kenyataan mayoritas keluarga yang ada di Desa Tongke-Tongke memiliki semangat kerjasama yang baik di mana antara suami maupun istri turut serta dalam berpartisipasi langsung dalam hal mencari nafkah. Walaupun terkadang istri merasakan bahwa bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban, meskipun mereka kadang merasakan ada yang tidak adil dalam hidup ini. Namun mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan. Sebab mereka sudah terbiasa di sosialisasi bagaimana menjadi istri yang baik, jika mujur mereka menikah mempunyai anak dan kaya. Sebaliknya jika mereka tidak mujur, maka hal itu merupakan nasib mereka.

Melihat keadaan tersebut, kondisi perekonomian masyarakat pesisir yang semakin sulit sehingga perempuan pesisir perlu di berdayakan dan diberikan peran untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi keluarganya. Dalam meningkatkan peran perempuan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, di perlukan strategi dalam pemberdayaan peran perempuan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat atau spesifik lokasi. Salah satu strategi akselerasi peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhitungkan dan bekerjasama dengan kaum laki-laki. Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis menentukan rumusan masalah pada penelitian yaitu Bagaimana pemberdayaan

perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Baharuddin (2005: 25), mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan gerakan kultural (budaya) melalui penyadaran akan kesejahteraannya. Sulistiyani (2004: 7), menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Kartasasmita (1997: 83), menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: (a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkan. (b) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. (c) memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Menurut Moenir (2008), masyarakat adalah orang yang terikat oleh kesamaan cita-cita, tujuan dan bekerja sama dalam pencapaian tujuan. Terbentuknya masyarakat kepentingan berawal dari kelompok sosial yang anggotanya tidak atas dasar keturunan dan atau ikatan perkawinan melainkan atas dasar kepentingan bersama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999), menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (a) Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (b) Mampu mengarahkan dirinya sendiri, (c) Memiliki kekuatan untuk berunding, (d) Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (e) Bertanggung jawab atas tindakannya.

Menurut Soekanto (2004: 18) dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini: (a) Beranggotakan minimal dua orang, (b) Anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, (c) Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat, (d) Menjadi sistem hidup ber-

sama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Menurut Satria (2009: 219), secara sosiologis masyarakat pesisir memiliki ciri yang khas dalam hal struktur sosial yaitu kuatnya hubungan antara patron dan klien dalam hubungan pasar pada usaha perikanan. "Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan. Dari masalah utang piutang tersebut sering terjadi konflik, namun konflik yang mendominasi adalah persaingan antar nelayan dalam memperebutkan sumberdaya ikan yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, sangatlah penting adanya pihak yang dapat mengembangkan sumberdaya laut dan mengatur pengelolaannya.

Slamet (2003: 79), menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, termotivasi, kesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

Adi (2003: 4), menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam

komunitas yang melakukan penolakan terhadap pembaharuan ataupun inovasi yang muncul.

Watson (dalam Adi, 2003), menyatakan beberapa kendala dalam pembangunan masyarakat, baik yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial: (a) Berasal dari kepribadian individu; kestabilan, kebiasaan, seleksi ingatan dan persepsi, ketergantungan yang terlalu kuat, cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri, (b) Berasal dari sistem sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu, yang "mengikat" sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya, kelompok kepentingan, hal yang bersifat sakral, dan penolakan terhadap "Orang Luar".

Jamasy (2004: 5-6), mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan.

Terkait tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004: 5), menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendali-

kan apa yang mereka lakukan. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu: (a) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (b) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan (c) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004: 17).

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan afektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan agar masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisinya.

Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dapat berlangsung baik, demokratis, efektif dan efisien, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan jika telah menyadari akan pentingnya peningkatan kapasitas. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan penguasaan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat berpartisipasi

pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut/obyek pembangunan saja, belum menjadi subyek pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: (a) Upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. (b) Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. (c) menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Sumodiningrat & Gunawan, 2002).

Pemberdayaan Ekonomi

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan bawah, serta ketersediaan lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan yang konsentrasi penduduk yang keberdayaannya kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. (Cholisin, 2011: 3)

Lebih lanjut cholisin, (2011: 3), mengungkapkan bahwa Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Menurut Sedarmayanti (200: 123), mengungkapkan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia

yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan manajemen". Dari definisi diatas dapat diambil beberapa hal penting dari pengertian pemberdayaan, yaitu: dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif serta dapat mengisi lapangan kerja dan mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja.

Menurut Atmosoeparto (2002: 64), menjelaskan tentang pemberdayaan sumber daya manusia sebagai berikut: "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan pembelajaran harus bermuara pada terwujudnya manusia yang mampu mengaktualisasikan dirinya.

Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Menurut Novian (2010: 1), pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Lebih lanjut (Novian, 2010: 12), mengungkapkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah: (a) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan berkeuarga bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (b) Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; (c) Meningkatkan kualitas peran kemandirian organisasi perempuan dengan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan; (d) Meningkatkan komitmen dan kemampuan

semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender; (e) Mengembangkan usaha pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta Perlindungan Anak.

Ketidakadilan gender dalam masyarakat pedesaan secara faktual secara menonjol. Untuk pekerjaan yang sama misalnya di bidang pertanian, perempuan sering memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Selain itu laki-laki sering mendominasi sektor publik, sedangkan perempuan hanya berada di sektor Domestik yang secara ekonomis dianggap kurang strategis. Bahkan untuk berbagai pekerjaan yang secara tradisional merupakan pekerjaan perempuan, jika teknologi mekanis sudah masuk kedalamnya dan secara ekonomis dianggap menguntungkan, maka biasanya laki-laki akan mengambil peran tersebut atau menggantikan peran perempuan.

Erat kaitannya dengan keterampilan tersebut adalah kegiatan pengolahan ikan di desa pesisir pantai. Kegiatan pengolahan ikan pasca tangkap bertujuan untuk mempertahankan kualitas ikan agar dapat dikonsumsi dalam waktu lebih lama. selain itu, pengolahan juga bertujuan untuk menghasilkan produk baru yang karakteristiknya jauh berbeda dari ikan segar. Jenis pengolahan ini ada yang sifatnya masih tradisional, adalah pengeringan dengan sinar matahari, pengasinan, fermentasi dan pemindangan.

Faktor pendukung peningkatan peranan perempuan adalah kemampuan kerjanya tinggi, dorongan keluarga cukup kuat, dan lokasi kegiatan merupakan objek wisata potensial yang membutuhkan aktivitas perempuan dalam perdagangan. Kendala yang dihadapi rendahnya akses perem-

puan terhadap sumber daya modal, transportasi dan informasi. Tantangan terhadap kemajuan dan keberadaan perempuan dalam perdagangan di daerah tersebut masuknya bakul pria dengan modal yang lebih kuat yang mampu memberikan penawaran yang lebih tinggi.

Yang perlu dilakukan adalah pendekatan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan agar tidak dianggap sebagai beban dengan menerapkan strategi pemberdayaan perempuan. Dalam konsep pemberdayaan diperlukan 3 persyaratan, yaitu pemberian kemampuan, memberi peran dan peluang dan memberikan fasilitas dan dana.

Strategi yang dipilih perempuan untuk mempertahankan eksistensi dan posisinya dalam perdagangan adalah dengan membentuk kelompok usaha. Hal ini untuk meminimalkan persaingan diantara perempuan dan memperkuat modal dalam kelompok. Strategi perempuan untuk meningkatkan pendapatannya adalah dengan memperluas jangkauan pemasaran, memasuki desa-desa dan membawa dagangan.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif digunakan karena penyelesaian masalah akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak prajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi (Moeleong, 2010).

Informan dalam penelitian kualitatif ini adalah seluruh masyarakat perempuan pesisir dan pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan perempuan pesisir, adapun rincian informan seba-

gai berikut: Pemerintah Desa Tongke-Tongke, masyarakat perempuan pesisir dari 5 dusun, tokoh perempuan desa Tongke-tongke, pengurus PKK di Desa Tongke-tongke, informan lain yang mengetahui terkait pemberdayaan perempuan

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yaitu awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember 2013. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Observasi, dilakukan untuk mengecek data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga metode ini dilakukan dengan mengamati kegiatan masyarakat pesisir di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai; (2) Wawancara, mengadakan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui pemberdayaan masyarakat pesisir Desa Tongke-Tongke. (3) Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analiais interkatif yang ini dijalankan dengan cara sebagai berikut: (1) Reduksi data yang meliputi proses merangkum dan memilah data yang berkaitan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. (2) Penyajian data yang dapat diartikan sebagai pengorganisasian data yang telah direduksi. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterlibatan perempuan pada kegiatan ekonomi keluarga di Desa Tongke-Tongke memberi-

kan pandangan tersendiri bahwa antara kaum pria maupun kaum perempuan tidak ada pembakuan peran bahwa perempuan hanya mampu berperan di dalam rumah tangga saja sedangkan kaum laki-laki bertugas di luar rumah, kenyataannya mayoritas keluarga yang ada di Desa Tongke-Tongke memiliki semangat kerjasama yang baik di mana antara suami maupun istri turut serta atau ikut berpartisipasi langsung dalam hal mencari nafkah walaupun terkadang istri juga merasakan bahwa bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban, meskipun mereka kadang merasakan ada yang tidak adil dalam hidup ini. Namun mereka juga tidak mampu berbuat apa-apa untuk melawan. Sebab mereka telah terbiasa disosialisasi bagaimana menjadi istri yang baik, jika mujur, mereka menikah, mempunyai anak dan kaya. Sebaliknya jika mereka tidak mujur, maka hal itu merupakan nasib mereka.

Dalam rangka meningkatkan peran perempuan pesisir di Kecamatan Sinjai Timur, diperlukan strategi dalam pemberdayaan peran perempuan sesuai kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat atau yang spesifik lokasi. Salah satu strategi akselerasi peran perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan adalah dengan memperhitungkan dan bekerja sama dengan kaum lelaki.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

serta berupaya mengembangkannya. Berikut hasil wawancara tentang perlunya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan pesisir untuk berkembang.

Hasil wawancara dengan Hasni Murni, salah seorang pengurus PKK Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan pesisir untuk berkembang. Yaitu perempuan melakukan investasi sesuai dengan iklim yang terjadi misalnya investasi modal saat di musim ikan, modal yang diinvestasikan diberikan kepada para penjual ikan. Di samping itu membangun daya bagi perempuan dengan memberikan pelatihan agar mereka mampu mandiri misalnya dalam pembuatan ikan abon, bakso ikan, kripik ikan dan lain sebagainya. Dengan adanya pengembangan pengetahuan tentunya perempuan tidak tergantung lagi pada penghasilan suami semata-mata karena perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke masih ada yang belum sejahtera” (wawancara: Rabu, 11 Desember 2013).

Diungkapkan oleh Nurlaela, S.Ag., selaku Kaur Pemerintah Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Menciptakan suasana atau iklim yang dapat mengembangkan potensi perempuan pesisir sangat perlu. Dengan melakukan pengelolaan ikan, misalnya membuat ikan abon, kripik ikan atau pembuatan bakso ikan” (wawancara: Rabu, 18 Desember 2013).

Diungkapkan oleh Rafika, salah seorang masyarakat Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Sangat perlu menciptakan suasana atau iklim yang dapat mengembangkan potensi perempuan pesisir, karena setiap manusia khususnya kaum perempuan pesisir memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan upaya melakukan pembinaan, mengikutkan perempuan dalam sebuah

saha dan memberikan pelatihan untuk membuka daya dan bakatnya misalnya membuat kripik ikan atau membuat bakso yang bahan dasarnya ikan” (wawancara: Kamis, 19 Desember 2013).

Perlunya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan pesisir untuk berkembang. Yaitu perempuan melakukan investasi sesuai dengan iklim yang terjadi misalnya investasi di musim banyaknya ikan, modal yang diinvestasikan diberikan kepada para penjual ikan. Di samping itu membangun daya bagi perempuan dengan memberikan pelatihan agar mereka mampu mandiri dalam mengelola usahanya misalnya membuat kripik dari ikan, bakso dari ikan, ikan abon dan lain sebagainya.

Diperkuat oleh Usri Al Usra, selaku Sekretaris Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan pesisir untuk berkembang sangat perlu dan harus diberdayakan sesuai dengan potensi masing-masing perempuan. Menurut saya membangun daya kekuatan atau kemampuan perempuan pesisir, dengan memberikan latihan agar dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Upaya yang perlu dilakukan agar perempuan pesisir lebih berdaya yaitu dengan membuka usaha-usaha baru sesuai dengan kemampuan perempuan pesisir itu sendiri dan perlunya bantuan pemerintah kabupaten dalam hal akses modal dan pelatihan yang bermanfaat” (wawancara: Selasa, 10 Desember 2013).

Dapat disimpulkan bahwa perlunya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi perempuan pesisir untuk berkembang. Yaitu perempuan melakukan investasi sesuai dengan iklim yang terjadi misalnya investasi di musim banyaknya ikan, modal yang diinvestasikan diberi-

kan kepada para penjual ikan. Di samping itu membangun daya bagi perempuan dengan memberikan pelatihan agar mereka mampu mandiri dalam mengelola usahanya misalnya membuat kripik dari ikan, bakso dari ikan, ikan abon dan lain sebagainya.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Perlunya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke. Suasana atau iklim yang dimaksud di sini misalnya apabila di musim ikan kaum perempuan bisa melakukan pengolahan ikan menjadi sesuatu yang bisa menjadi penghasilan sendiri misalnya investasi membuat usaha pengeringan ikan, pembuatan ikan menjadi bakso ikan, pembuatan ikan abon dan lain sebagainya. Potensi hasil laut yaitu musim di mana hasil laut seperti ikan melimpah, tentunya musim tersebut bisa dimanfaatkan kaum perempuan untuk betusaha mengelolah ikan tersebut untuk dijadikan penghasilan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlunya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh perempuan pesisir. Dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh perempuan pesisir dapat memungkinkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Diperkuat oleh Usri Al Usra, selaku Sekretaris Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki perempuan pesisir sangat perlu, dengan memperkuat potensi daya yang dimiliki dalam diri perempuan pesisir akan memungkinkan dirinya untuk bisa membangkitkan motivasinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya”. (wawancara: Selasa, 10 Desember 2013)

bankan potensi yang dimilikinya”.
(wawancara: Selasa, 10 Desember 2013)

Dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh perempuan pesisir dapat memungkinkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Memperkuat daya dan potensi yang dimiliki perempuan pesisir sangat perlu, dengan memperkuat potensi daya yang dimiliki dalam diri perempuan pesisir akan memungkinkan dirinya untuk bisa membangkitkan motivasinya untuk mengembangkan potensi atau bahkan yang tersimpan dalam diri perempuan pesisir.

Kesempatan yang diberikan kepada perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke, dengan membuka akses pada modal, teknologi dan berbagai peluang lainnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya, adapun kelompok perempuan yang ada di Desa Tongke-Tongke yaitu kelompok “Kube Flamboyan” dan kelompok pengasapan ikan yang dananya tersebut dikelola langsung oleh kaum perempuan yang dipergunakan secara bersama serta adanya program PNPM Mandiri dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan beberapa pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

kesempatan yang diberikan kepada perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke, dengan membuka akses pada modal, teknologi dan berbagai peluang lainnya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya dengan cara lebih aktif dalam kegiatan kelompok yang ada yaitu kelompok “Kube Flamboyan” dan kelompok pengasapan ikan. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa modal usaha kepada perempuan pesisir untuk dipergunakan dengan baik namun yang masih perlu disini adalah pemerintah

kabupaten memberikan tempat usaha bagi masyarakat khususnya perempuan pesisir dalam mendukung usaha dari kegiatan perempuan pesisir dan selain itu perlu adanya pendampingan agar modal yang diberikan bisa dipergunakan sehingga bisa mensejahterakan perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke.

Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Perlunya pemerintah melindungi (memberdayakan) perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki di Desa Tongke-Tongke. Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki sesuai dengan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat mengerjakan apa yang mampu dikerjakannya sesuai dengan kemampuan laki-laki seperti mengikuti perempuan dalam sebuah proyek.

Pemerintah perlu melindungi (memberdayakan) perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki di Desa Tongke-Tongke baik dalam hal ekonomi, teknologi maupun agama, memberikan modal usaha untuk meningkatkan perekonomian, pemberian informasi dan pelatihan teknologi serta memberikan pemahaman agama agar tercipta kerukunan antara sesama khususnya dalam menjaga hubungan kerjasama antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Pemerintah telah memandirikan (memberdayakan) kaum perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki khususnya perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke namun pelaksanaan-

hal sumber daya manusia perempuan pesisir. Selain sumber daya juga yang menjadi penghambat adalah modal yang diberikan kepada kelompok usaha pembagiannya belum merata. Semua disebabkan karena adanya hal-hal yang tidak sesuai oleh pembuat kebijakan dengan modal tersebut. Maksudnya modal hanya diberikan kepada orang-orang terdekat dari pembuat kebijakan yang menyebabkan kelompok usaha yang lain tidak diberikan begitupun kepada perempuan pesisir lainnya tidak diberikan. Jadi harapan saya agar modal yang diberikan dan dibagikan merata kepada kelompok usaha serta modal tersebut lebih ditingkatkan nominalnya atau ada penambahan modal agar usaha yang dimiliki lebih maju.

Pemerintah telah memandirikan (memberdayakan) kaum perempuan pesisir agar sejajar dengan kaum laki-laki khususnya perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke namun pelaksanaannya belum maksimal sehingga masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal sumber daya manusia perempuan pesisir.

Berikut hasil wawancara tentang kemampuan perempuan pesisir berdayaguna, mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Tongke-Tongke.

Diungkapkan oleh Rafika, salah seorang masyarakat Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Kemampuan perempuan pesisir berdayaguna, mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan mengembangkan potensi yang dimiliki perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke, hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan kelompok usaha yang diperuntukkan oleh perempuan-perempuan pesisir di Kecamatan Sinjai Timur khususnya

perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke”
(wawancara: Kamis, 19 Desember 2013).

Kemampuan perempuan pesisir berdayaguna, mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Tongke-Tongke sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya pembentukan kelompok usaha yang diperuntukkan oleh perempuan-perempuan pesisir di Kecamatan Sinjai Timur khususnya perempuan pesisir Desa Tongke-Tongke. Selain itu perempuan pesisir sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan modal atau dana untuk dikembangkan dan diadakan evaluasi sampai di mana kemampuan perempuan dalam pengembangan modal tersebut. Meskipun upaya pemberdayaan telah dilakukan namun masih ada kendala yang perlu dibenahi dalam mendukung pemberdayaan perempuan pesisir yaitu masalah kurangnya partisipasi perempuan pesisir dalam hal pelatihan pemberdayaan perempuan, baik dalam hal pembinaan, pelatihan teknologi dan modal sehingga perlu penyadaran terlebih dahulu.

Kemampuan perempuan pesisir berdayaguna, mampu bersaing dengan kaum laki-laki dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki di Desa Tongke-Tongke sudah cukup baik. Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar lebih memberdayakan masyarakat khususnya perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke. Hasil wawancara dengan Hasni Murni, salah seorang pengurus PKK Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar perempuan pesisir lebih berdaya yaitu membuka lapangan kerja atau membuka suatu usaha di bidang pemberdayaan ekonomi yang melibatkan perempuan pesisir, selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan di bagian modal

selain itu pemerintah juga perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan di bagian modal atau bisa diartikan pendampingan serta pemberian pemahaman tentang teknologi” (wawancara: Rabu, 11 Desember 2013).

Diungkapkan oleh Rafika, salah seorang masyarakat Desa Tongke-Tongke, menyatakan bahwa:

“Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu: Membuka lapangan kerja bagi perempuan pesisir, menambah besarnya modal untuk kelompok usaha kube flamboyan dan kelompok pengasapan ikan, menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang usaha perempuan pesisir agar lebih maju dan sukses” (wawancara: Kamis, 19 Desember 2013).

Upaya yang harus dilakukan pemerintah agar lebih memberdayakan masyarakat khususnya perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke yaitu: (1) Membuka lapangan kerja baru, berupa usaha-usaha yang melibatkan perempuan pesisir serta meningkatkan pelatihan-pelatihan yang bukan hanya di bagian modal atau ekonomi akan tetapi di bidang teknologi, kesehatan dan peningkatan pengetahuan serta perlu diadakan pelatihan berupa cara pengelolaan ikan, pembuatan abon, pembuatan bakso ikan dan pembuatan ikan kaleng; (2) Menambah besarnya modal untuk kelompok usaha perempuan pesisir; 3) Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang usaha perempuan pesisir agar lebih maju dan sukses dalam kehidupan khususnya dalam peningkatan perekonomian keluarga.

Selain itu pemerintah desa telah berupaya memberdayakan perempuan pesisir dengan memberikan pelatihan dan pemahaman teknologi khususnya di segala bidang, misalnya di bidang teknologi informasi sekarang ini telah ada internet

masuk desa yang tujuannya agar perempuan pesisir lebih cepat mendapat informasi dan berguna untuk memasarkan penghasilannya. Dan sekarang ini pemerintah desa telah berupaya berdialog dengan pemerintah kabupaten agar menambah bantuan dana kepada masyarakat/perempuan pesisir agar masyarakat pesisir bisa meningkatkan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hak akses modal pemerintah sudah melakukan program pemberdayaan bagi perempuan pesisir yang ada di Desa Tongke-Tongke. Modal yang diberikan kepada kelompok-kelompok usaha tersebut pembagiannya belum merata ke semua perempuan pesisir di Desa Tongke-Tongke. Semua disebabkan karena modal yang diberikan yang berupa modal simpan pinjam kepada perempuan pesisir adanya hal-hal yang tidak sesuai didalamnya oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini saya menemukan salah satu kelompok perempuan di Desa Tongke-Tongke masih menggunakan modal sendiri, padahal di mana kita ketahui pemerintah telah memberikan bantuan modal untuk kelompok usaha, tapi lagi-lagi terdapat hal-hal yang tidak diinginkan. Modal usaha yang diberikan hanya disalurkan kepada usaha yang modalnya besar dan orang-orang terdekat dari pembuat kebijakan tersebut. Hal ini membuat kelompok usaha lainnya tidak berjalan dengan baik karena modal yang menghambatnya.

Bukan hanya pelatihan-pelatihan kepada kelompok usaha yang ada tapi semua perempuan pesisir yang ada di Desa Tongke-Tongke harus diberikan pelatihan dan membuka lapangan kerja berupa usaha-usaha kecil agar dapat menopang penghasilan suami pada saat suami turun ke laut

Disarankan agar pemerintah membuka suatu usaha atau membentuk sebuah kelompok simpan pinjam yang ditangani langsung oleh perempuan pesisir dan dana tersebut dikhususkan bagi perempuan pesisir yang ingin membuka usaha serta harapkan agar perempuan pesisir lebih meningkatkan bakatnya dengan berupaya dan berusaha membuat suatu kegiatan usaha misalnya usaha pembuatan kripik ikan dan semacamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2003. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Badaruddin, dkk. 2005. Isu-Isu Kelautan: dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Disampaikan pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman. <http://staff.uny.ac.id> diakses pada tanggal 3 Oktober 2013
- Congge, Umar. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi. Sinjai. STISIP Muhammadiyah Sinjai.
- Hasibuan, Muhammad Nuh. 2012. Peran Penyuluh Agama dalam Pemberdayaan Majelis Taklim Kaum Ibu dalam Meningkatkan Pemahaman dan Pengalaman Agama. <http://sumut.kemeneg.go.id/> diakses pada tanggal 3 Oktober 2013
- Jamasy. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Edisi I, Jakarta: PT. Cidesindo.
- Coordinator Statistik Kecamatan Sinjai Timur. 2012. Kecamatan Sinjai Timur dalam Angka 2012. Sinjai. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai.
- Moeleong Lexy. J. 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moenir, H.A.S. 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhadjir M. Darwin. 2005. Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Graha.
- Novian Budhy. 2010. Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan, <http://kelurahanpondokbambu.com> diakses pada 4 Oktober 2013
- Satria. 2002. Pengantar Sosial Masyarakat Pesisir. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Slamet. 2003. Administrasi Pendapatan Daerah. Jakarta : STIA LAN Press.
- Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2002. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Sumardjo. 1999. Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat. Disertasi Doktor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogyakarta: Gava Media
- Soetrisno, Loekman. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Dan Upaya Pembebasan Kemiskinan. Yogyakarta: Philosophy Press
- Susanto. 2011. Sudahkan Wanita Tiang Negara? <http://jatim.kemeneg.go.id> diakses pada tanggal 3 Oktober 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.